

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua

Oleh:
Tundiles Kogoya¹
Ventje Kasenda²
Fanley Pangemanan³

Abstrak

Pengentasan Kemiskinan di distrik Nunggawi Kab. Tolikara dalam implementasinya itu belum maksimal karena dapat dilihat dari permasalahan yang ada di Distrik Nunggawi tersebut yang angka kemiskinannya tidak ada perubahan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas. Dan kemudian tidak ada berupa bentuk evaluasi yang di lakukan pada tiap tahunnya untuk bagaimana dapat meningkatkan produktifitas kerja dalam pengentasan kemiskinan, sehingga proses kemiskinan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang di diharapkan. Berdasarkan penjelasan ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di distrik Nunggawi kabupaten Tolikara provinsi Papua. Kepentingan kelompok sasaran implementasinya belum baik. Dalam Program pelayanan kesehatan bagi Orang miskin dengan cara mengajak partisipasi aktif dari masyarakat distrik nunggawi untuk mendukung program pelayanan ini yang telah berjalan meskipun masih mandek-mandek. Derajat perubahan yang diinginkan yaitu kemampuan dari Pemerintah distrik dan pemerintah desa harus meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan di berbagai departemen, lalu Pemberian bantuan modal dan pelatihan usaha kecil menengah (UKM). Implementasi kebijakan pemerintah daerah pendidikan bagi anak-anak yang ada di distrik nunggawi, membiayai biaya studi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Seperti dibebaskannya biaya sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) serta dibebaskan biaya-biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). lalu Program perbaikan rumah layak diuni. Karena saat ini warga masih pake rumah honai di distrik nunggawi.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengentasan Kemiskinan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

PENDAHULUAN

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka meminimalisir permasalahan kesejahteraan di Indonesia, pemerintah melalui kementerian sosial menggunakan berbagai program untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan tersebut berupa: a). Bantuan Langsung Tunai (BLT); b). Bantuan Rakyat Miskin (Raskin); c). Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); d). Kartu Indonesia Sehat (KIS) e). Pendidikan Gratis; f). Kesehatan Gratis; g). Kartu Indonesia Pintar. Karena merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, agar tercipta masyarakat yang sejahtera.

Upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat yang berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia No 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial. Program perlindungan tersebut antara lain: a). program simpanan keluarga sejahtera; b). program Indonesia Pintar; c). program Indonesia Sehat.

Selain Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu simpanan keluarga sejahtera ini

adalah kartu di dalamnya ada program simpanan keluarga sejahtera yang merupakan uang digital dari pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS) yang diberikan kepada keluarga tidak mampu, secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti suhan, panti jompo, dan panti-panti sosial lainnya. Kartu keluarga sejahtera yang merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan Rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu melalui kartu keluarga sejahtera yang disertai dengan SIM Card untuk layanan keuangan digital (LKD) yang merupakan pengganti kartu perlindungan sosial (KPS), kartu itu merupakan program pemerintah.

Sebelumnya juga meluncurkan kartu perlindungan sosial dalam rangka program percepatan dan perluasan sosial (P4S) seperti (KPS). Dengan KPS tersebut, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti: Raskin dan bantuan siswa miskin (BSM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada tahun 2014 kartu perlindungan sosial tersebut di ganti dengan kartu keluarga sejahtera (KKS) kartu Indonesia Pintar (KIP) serta kartu Indonesia Sehat (KIS). (detik.com)

Kartu keluarga sejahtera (KKS) itu sendiri merupakan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, dengan pemberian dana stimulasi antara lain melalui kartu keluarga sejahtera sebagai pengganti kartu perlindungan sosial (KPS). Setiap kepala keluarga atau rumah tangga pemegang KKS akan mendapatkan bantuan non tunai sebesar Rp. 200.000 perbulan. Kartu ini diisi setiap dua bulan, di sertai pemberian satu sim card. Sim card ini dapat berfungsi ganda yakni selain sebagai nomor Hand Phon juga

sekaligus menjadi nomor rekening bagi peserta keluarga sejahtera dalam menyalur dana simpanan

Khusus di Kabupaten Tolikara sendiri, kartu keluarga sejahtera ini *launched* pada tanggal 18 april 2016. Adapun jumlah penerima kartu keluarga sejahtera pada tahun 2016 kabupaten Tolikara yakni sebanyak 8538 kartu KKS dengan total bantuan sebesar Rp. 31.420.800.000. yang akan bagi ke 46 distrik salah satunya Distrik Nunggawi terdapat 1657 KKS yang terbesar ke 541 desa 4 kelurahan. (Dinas sosial Kabupaten Tolikara) berdasarkan Data tersebut di atas yang mendorong Dinas Sosial Kabupaten Tolikara untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data dan melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima program simpanan keluarga sejahtera sebagaimana yang terdapat dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program.

Papua merupakan daerah Di Kawasan Timur Indonesia yang mengalami ketertinggalan pembangunan selama beberapa daerah, kebijakan hanya diterapkan yang memberi kewenangan sangat besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola akselerasi pembangunan daerah masing-masing. Program dan kegiatan pembangunan sangat di perlukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan daerah ini, sehingga masing-masing kabupaten/ kota di papua nantinya mampu berkedudukan sejajar dengan daerah- daerah yang lain di Indonesia. Salah satu program yang secara khusus ditetapkan untuk dilaksanakan di papua adalah rencana strategi pembangunan dengan orientasi untuk membangun

wilayah dan masyarakat setempat secara lebih intensif pada tingkat kampung. Dengan ketertinggalan pembangunan daerah ini, kondisi kehidupan fisik dan non-fisik masyarakat kemiskinan di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua kurang memperhatikan. Kondisi fisik menunjukkan sangat terbatasnya fasilitas dan infrastruktur publik, sedangkan kondisi non-fisik menunjukkan masih rendahnya jumlah dan kualitas sumberdaya (SDM) dan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat setempat. Kondisi pembangunan fisik yang sangat tidak memadai bahkan sangat tertinggal tersebut menunjukkan adanya yang disebut kemiskinan struktural. Konsep kemiskinan ini bukan hanya mengacu pada pengertian ekonomi, melainkan juga mengacu pada aspek-aspek struktural di luar itu, seperti sosial-budaya. Selain masyarakat miskin di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Mengalami menderita karena kurangnya atau bahkan tidak adanya pelayanan publik seperti telepon, penerapan listrik, air bersih, transportasi angkutan umum, sarana kesehatan, pendidikan, kredit, dan lain-lain serta kurangnya kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal, regional, dan nasional. Kondisi kemiskinan struktural semacam itu terjadi karena orang sering di terpinggirkan dan tidak berdaya dalam mempertahankan hak mereka ketika di langgar dan dieskloitasi oleh golongan kaya dan berkuasa sehubungan perlunya akselerasi pembangunan daerah di papua, isu yang paling menonjol di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat setempat papua adalah isu keterbalakangan dan kesenjangan

wilayah serta pembangunan seperti apa yang paling tepat untuk masyarakat lokal di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Masyarakat mengalami keterbelakangan dan kesenjangan wilayah, baik fisik, seperti kurang mendukungnya jumlah maupun kualitas sarana maupun prasarana maupun non-fisik seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan (SDM), masihrendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan lemahnya institusi lokal. Sarana prasarana fisik yang kurang memadai menyebabkan terisolasinya banyak warga masyarakat Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua di daerah perkampungan pendalaman yang terpencil (75%) tidak mampu menikmati proses maupun hasil pembangunan daerah yang berkeadilan. Pembangunan manusia maka UPNDP (*United Nations Development Programme*) adalah proses memperluas pilihan-pilihan pendidikan. dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang di anggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan. Pembangunan manusia dapat tercapai apabila ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran yang peting dalam pengembangan sumber daya manusia. Peran serta pemerintah sangat diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagai sumber daya baik

dari aspek fisik (kesehatan), aspek inteletualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (pendapatan), serta aspek moralitas. Indesk pembangunan manusia bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar Negara maupun antar daerah pembangunan manusia menjadi penting karena apabila suatu daerah tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun dan memajukan daerahnya. Jadi sumber daya manusia di Indonesia kini adalah Negara dengan sistim demokrasi baru yang bersemangat, dengan pemerintah yang terdesentralisasi, dengan adanya keterbukaan sosial dan ruang bagi debat publik yang jauh lebih besar. Untukmewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UUNo. 23 Tahun 2014 tetang pemerintah daerah. Dalam pengentasan kemiskinan pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksud sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai merupakan usai penghapusan subsidi minyak tanah, dan program konversi bahan bakar gas, penerapan /lampu, infrakstruktur, air bersih. Salain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang

kesehatan yaitu yaminan kesehatan masyarakat atau puskesmas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara, pemerintah daerah mempunyai Misi. Membangun Masyarakat Nunggawi Yang Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera dari misi tersebut maka jelas kebijakan pemerintah daerah itu adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan yang efektif, dan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi dalam implementasinya itu belum maksimal karena dapat dilihat dari permasalahan yang ada di Distrik Nunggawi tersebut yang angka kemiskinannya tidak ada perubahan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas. Dan kemudian tidak ada berupa bentuk evaluasi yang di lakukan pada tiap tahunnya untuk bagaimana dapat meningkatkan produktifitas kerja dalam pengentasan kemiskinan, sehingga proses kemiskinan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di distrik Nunggawi kabupaten Tolikara provinsi Papua.

METODE PENELITIAN

Untuk menemukan gambaran tentang upaya bertahan hidup

masyarakat miskin di distrik nunggawi disertai dengan unsu-unsur pokok yang harus di temukan dengan butir-butir fokus penelitian, rumus masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada akibatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berintraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan dan safsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1988). Dalam penelitian inidiamati adalah pekerjaan dari pada masyarakat miskin di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Papua ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kemiskianan di daerah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan dalam perkembangan di distrik tersebut. Kemudiandapat diketehui kesesuaian respon kebijakan tersebut terhadap karakteristik kemiskinyang terjadi. Metode penelitian yang akan digunakan dalam enelitian ini yaitu metode kualitatif. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Proses penelitian di mulai dengan menganalisis karakteristik kemiskinan pedesaan dan menganalisis respon kebijakan penanganan kemiskinan pedesaan. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi kesesuaian respon kebijakan penanganan kemiskinan pedesaan terhada karakteristik kemiskinan dalam perkembangan dinunggawi. Berdasarkanhasil analisis, dapat disimpulkan bahwa respon kebijakan penanganan kemiskinan di nunggawi belum sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah.

Hal ini ditunjukkan tidak semua karakteristik kemiskinan yang terjadi di distrik nungawi belum di respon oleh kebijakan penanganan kemiskinan Distrik Nungawi Kabupaten Tolikara Papua.

Penelitian ini diadakan di distrik Nungawi Kabupaten Tolikara letaknya cukup jauh dari pusat kabupaten namun kelemahan terjadi saat ini Distrik nungawi belum di respon oleh kebijakan penanganan kemiskinan. Rencana Meneliti tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan Distrik Nungawi Kabupaten Tolikara Papua.

Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan indikator implementasi kemiskinan Studi Distrik Nungawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Faktor Yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori (Merilee S. Grindle. 1980. Implementasi kebijakan dipengaruhi: Isi kebijakan yakni; 1) Kepentingan kelompok sasaran, 2). Tipe manfaat, 3). Derajat perubahan yang di inginkan, 3). Letak pengambilan keputusan

PEMBAHASAN

Penelitian ini memfokuskan pada hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan implementasi kemiskinan Studi Distrik Nungawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Faktor Yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori (merilee s. grindle. 1980).

Kepentingan kelompok sasaran.

Menurut merilee s. grindle.

Kepentingan kelompok sasaran yaitu keseluruhan dari yang menyangkut upaya dalam pencapaian tujuan yang harus dilihat sebagai bentuk suatu proses. Dalam hal ini pun, agar pencapaian suatu tujuan akhir semakin terjamin, dibutuhkan pentahapan, baik itu dalam segi pentahapan pencapaian untuk bagian – bagiannya maupun pentahapan dalam segi kebijakan implementasinya, terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target yang termuat dalam isi kebijakan.

Kepentingan tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Di distrik nungawi, lebih khusus di masyarakat setempat. Hal ini memiliki argumen bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak masyarakat untuk mencapai tujuan, dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap masyarakat distrik nungawi. sebagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala pemerintah.

Tipe manfaat,

Menurut merilee s. grindle. 1980. Tipe manfaat yaitu suatu ukuran terhadap tingkat kemampuan dari pemerintah distrik nungawi untuk melakukan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan dalam segi konsensus. Manfaat dalam hal ini menyangkut dalam suatu proses sosialisasi. Terkait aspek manfaat diketahui bahwa pihak yang berwenang dalam memberikan sosialisasi yaitu kepala distrik nungawi bersama pemerintah kabupaten. Dalam proses sosialisasi

pemerintah terkait melibatkan jajaran pemerintah kelurahan hingga desa agar sosialisasi yang dilangsungkan dapat secara menyeluruh dan dapat berkelanjutan. Sosialisasi sangatlah penting dalam mewujudkan efektivitas program pengentasan kemiskinan dalam rangka memanfaatkan.

Namun sosialisasi hanya dilakukan ketika awal diberlakukannya. Berdasarkan hasil dilapangan dari segi pemahaman masyarakat terkait dengan apa yang dimaksud dengan pengentasan kemiskinan ini juga masih belum maksimal. Banyak yang kurang mengetahui hal ini melihat dari segi sosialisasi pemahaman tentang manfaat program pengentasan juga kurang. Selain masyarakat yang kurang memahami, juga pegawai – pegawai yang bekerja di kantor di distrik pun belum semuanya mengetahui tentang program ini. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi pihak pemerintah setempat agar sosialisasinya lebih dipermantap. yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target pemerintah. Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.

Derajat perubahan yang diinginkan.

Menurut Merilee S. Grindle. Derajat perubahan yang diinginkan yaitu kemampuan dari pemerintah distrik dan pemerintah Desa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Berkaitan dengan kesesuaian dalam pelaksanaan program dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

Derajat perubahan yang

diinginkan pun terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Program pemerintah setempat masih memerlukan banyak pembaruan. Dalam hal ini sumber daya manusia baik dari jumlah pegawai, operator, maupun kemampuan dan sarana.

Dimana sumber daya disini berkaitan dengan sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan suatu organisasi pemerintahan. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi pemerintah. Tanpa sumber daya manusia, organisasi pemerintah akan berjalan lambat. Selain itu juga, fasilitas atau sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam efektivitas program pengentasan kemiskinan ini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat perubahan yang diinginkan, dilihat dari sumber daya manusia belum efektif, hal ini dilihat dari minimnya petugas, yang bertugas mengelola program ini, dan pemerintah yang bertanggungjawab terhadap program tersebut yang sudah pindah instansi. Untuk meningkatkan potensi atau kemampuan sumber daya manusia, Badan Pendapatan Daerah kabupaten pun harus menugaskan beberapa pegawai negeri sipil untuk mengikuti bimbingan teknis maupun sosialisasi atau studi banding ke beberapa daerah yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan menyangkut implementasi kebijakan pemerintah dalam hal ini terkait dengan pengentasan kemiskinan dalam rangka pelayanan publik. Dan juga dilihat dari tersedianya fasilitas atau sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan lagi. Melalui implementasi kebijakan ini sejauh mana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah

kebijakan.

Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.

Letak pengambilan keputusan.

Apakah program pemerintah setempat sudah tepat atau belum. Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa, Bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas), Kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon

dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh manakah kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Dalam sebuah proses implementasi kebijakan yang dinilai adalah desain program aksi untuk mempengaruhi aktifitas implementasi yang nantinya dapat menghasilkan dampak bagi masyarakat atau individu serta daya perubahan yang diinginkan sehingga dari desain dan aksi program dirumuskan untuk dilaksanakan hingga tercapainya suatu tujuan dari sebuah proses implementasi. Konten dari implementasi sendiri berisi tentang kepentingan yang terpengaruh, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan, program implementasi, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara untuk konteks implementasi ialah mengenai kekuatan, strategi dan aktor yang terlibat, karakteristik rezim dan institusi serta daya kepatuhan dalam pelaksanaan implementasi.

Berdasarkan pada teori implementasi Merilee S. Grindle diatas menjadi dasar pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti akan melihat bagaimana kebijakan program yang ada, akan dalam penerapannya pada kegiatan layanan referensi sehari-hari, bagaimana keberadaan kebijakan program tersebut dan manfaat yang didapatkan oleh pengguna. Dari beberapa aspek tersebut, peneliti menggunakan aspek derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan

program, dan tingkat kepatuhan dan daya tangkap.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di distrik nungawi belajar dari pengalaman selama ini, kita menemukan bahwa kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan selama ini harus diubah. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa yang harus menjadi aktor utama untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari lingkaran kemiskinan adalah masyarakat miskin itu sendiri, bukan pemerintah atau pun pihak lain. Untuk itu, masyarakat miskin harus ditingkatkan kemampuannya untuk diperdayakan dan ditingkatkan kemandiriannya.

Kenyataan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang bertumbuh pada pendekatan pemberdayaan masyarakat justru memberikan hasil yang lebih efektif dan tingkat keberlanjutannya jauh lebih baik dari pada yang dilaksanakan oleh proyek seperti biasa. Pengaman kebijakan penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa bila masyarakat miskin diberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk menentukan arah yang mereka sukai untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, maka masyarakat miskin bergiat bahkan tidak ragu-ragu untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut. Rasa kepemilikan terhadap program yang lebih kuat dan ada perasaan bahwa mereka diharga untuk menentukan sendiri. Pada prinsipnya, upaya pemberdayaan masyarakat yang di jalankan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran harus mencakup upaya menguatkan

kemampuan masyarakat, upaya mengembangkan kewirausahaan yang digerakkan melalui upaya pendampingan masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan akses terhadap modal ekonomi/ sumber daya kapital langsung kepada masyarakat. Melalui dukungan ketika aspek ini secara memandai, maka upaya penanggulangan kemiskinan dapat berhasil secara efektif. Dalam banyak kasus, kemiskinan selalu dipandang perspektif makro. Studi-studi kemiskinan pada umumnya lebih fokus pada aspek antara kebijakan makro dan kemiskinan, misalnya dampak subsidi BBM terhadap kemiskinan, dampak terhadap taraf hidup penduduk miskin, kita juga tetap menyangsikan kesimpulan yang menyatakan bahwa kenaikan harga beras menjadi penyebab utama terjadinya pembengkakan penduduk miskin. bahkan menuduh bahwa bank dunia telah melakukan simplifikasi yang berlebihan atas kompleksitas masalah kemiskinan.

Mengandalkan studi makro memang seringkali tidak memuaskan. Informasi yang dihasilkan hampir tidak pernah akurat dan valid. Dan seterusnya. Akibatnya, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran, ketidakjelasan terket, biasa ke orang non miskin, menjadi. Keunggulan studi ini adalah keakurasiannya dalam mengidentifikasi karakteristik penduduk miskin, sehingga pada gilirannya sangat memudahkan dalam implementasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan serta melakukan evaluasi atas kemajuan yang dicapai dalam berbagai upaya pengentasan kemiskinan. Dengan studi mikro, para pengambil kebijakan tidak perlu lagi gagap setiap kali ditanya, dimana persisnya terjadi

penurunan angka kemiskinan, apa yang menyebabkan penurunan tersebut, upaya-upaya apa yang signifikan mengurangi angka kemiskinan, bagaimana efektifitas kebijakan dan program yang diimplementasikan.

Guna mengarahkan penelitian ini maka peneliti mempergunakan teori implementasi kebijakan edwar III yaitu komunikasi sumber daya disposisi struktur birokrasi komunikasi salah satu aspek yang cukup berperan dalam kabupaten tolikara adalah proses sosialisasi dari suatu program yang akan di terapkan, artinya suatu program penanggulangan kemiskinan, komunikasi sangat diperlukan target group sangat berperang sebagai upaya untuk memperkenalkan suatu program kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui sosialisasi kepada masyarakat miskin sehingga program dapat berjalan secara baik dan tepat sasaran.

Di samping itu, komunikasi juga merupakan kegiatan yang penting dalam proses kepemimpinan, sebab untuk menggerakkan atau mempengaruhi bawahan akan efektif jika dilakukan melalui komunikasi. Pada pelaksanaan sosialisasi program kebijakan penanggulangan kemiskinan di distrik nunggawi dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi secara formal pada kelurahan, juga dilakukan oleh instansi atau dinas sosial demikian pula organisasi non pemerintah atau LSM banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung terutama pada penduduk miskin. Berdasarkan aspek komunikasi dalam kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui sosialisasi program, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin untuk terlibat secara langsung sebagai salah

satu wujud untuk mencapai tingkat keberhasilan suatu program kegiatan. Kemampuan berkomunikasi menjadi sangat diperlukan untuk menjamin agar pesan yang disampaikan tidak terjadi distorsi dan di mengerti oleh masyarakat (target group). Di samping itu ada beberapa organisasi lain untuk pendamping sebagai ujun tombak dalam penyapaian berbagai program partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mutlak diperlukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut.

Dalam perkembangan yang terjadi, menunjukkan bahwa konsepsi partisipasi masih cenderung diartikan secara salah kaprah. Atas nama partisipasi atau pun atas nama gotong royong, pemerintah seringkali meminta rakyat untuk ikut serta dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam aspek komunikasi berdasarkan hasil penelitian yang sangat perlu mendapat perhatian oleh pemerintah dalam penerapan strategi penanggulangan kemiskinan di distrik nunggawi adalah kemampuan para instansi pelaksana program untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin, karena selama ini banyak sekali program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dialokasikan pada pemerintah kelurahan dan kecamatan sehingga upaya untuk keberhasilan program tersebut yang dibutuhkan system koordinasi antara berbagai instansi dalam memberikan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dengan baik bahwa program tersebut ini yang berasal dari dinas sosial. Dari dinas atau instansi dari dinas koperasi dan sebagainya. Sumber daya bagaimana unit kerja pemerintah (agencies) mendapatkan sumber daya yang

dibutuhkan untuk melaksanakan administrasi program yang meliputi sumber daya pembiayaan, sumber daya aparatur, dan sumber daya lingkungan dimana program tersebut dilaksanakan.

Kriteria perolehan sumber daya yang disebut itu hendaknya dapat memenuhi pencapaian tujuan dan hasil program. Artinya, penggalangan sumber daya harus menjamin tercapainya tujuan dan hasil program yang efektif dan efisien, bila unit-unit kerja pemerintah tidak mampu menterjemahkan kebijakan dan program kedalam suatu system perencanaan kegiatan yang dapat mencapai sasaran secara tepat guna. penerjemahan kebijakan dan program kedalam kegiatan operasional ini yang akan menentukan kinerja kebijakan dalam memberdayakan masyarakat miskin atau menurunkan jumlah penduduk miskin di distrik nunggawi kabupaten tolikara papua.

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan, selanjutnya di analisis secara kualitatif, integral dan komphrensif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan (Miles dan Huberman 1994). Di awali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abtraksi teoritis terhadap infomasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau infomasi tentng peristiwa atas objek yang di kaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa factual dan realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan obtervasi dan pendalaman

makna, maka diperoleh suatu analisis data yang terus menerus secara simultan sepanjang proses penelitian.

Berdasarkan letak geografis kabupaten tolikara distrik nunggawi terdiri dari pengunungan. Dilihat dari kultur mata pencaharian penduduk kabupaten tolikara meliputi, pertanian, perdagangan industry dan pariwisata sumber penghasilan terbesar adalah hasil pertanian, ketergantungan dari pertanian dan nelayan biasanya masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi, hal ini mencerminkan bagaimana tingkat kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Tolikara Distrik Nunggawi. Masyarakat yang meliputi, pertanian, dan perdagangan, ketiganya ada perbedahan dari sisi kehidupannya. Apa bila dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, angka parsitipasi (APK) bidang pendidikan dan angka pembangunan manusia (APM) Masyarakat Pertanian dan perdagangan jelas berbeda sehingga penanganan pengentasan kemiskinan juga berbeda.

Perkembangan Program implementtasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di distrik nunggawi, peneliti melakukan penelitian di lapangan, melalui Bapak Enos.kogoya S.E selaku Kepala distrik atau camat, Informasi tentang implementasi kebijakan pemrintah daeah dalam pengentasan kemiskinan di distrik nunggawi kabupaten tolikara provinsi papua. peneliti menemukan fakta bahwa Program pengetasan kemiskinan ini akan di implementasikan. Alasannya karena pemerintah belum bisa diakses untuk semua program seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa hanya wajib yang golongan menegah keatas yang bisa

mengakses program tersebut. pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana) sumber daya manusia, peralatan. Material dan masukan lainnya, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Sampai saat ini tentunya peneliti akan membahas soal implementasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di distrik nunggawi. Pada prinsipnya, upaya pemberdayaan masyarakat yang di jalankan menanggulangi kemiskinan dan peganngguran harus mencakup upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, upaya mengembangkan kewirausahaan yang digerahkan melalui upaya pendampingan masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan akses terhadap modal ekonomi /sumber daya ekonomi kapital langsung kepada masyarakat. Melalui dukungan ketika aspek ini secara memandai, maka upaya penanggulangan kemiskinan dapat berhasil secara efektif. Dalam banyak kasus, kemiskinan selalu di pandang perpektif makro. Studi-studi kemiskinan pada umumnya lebih fokus pada aspek antara kebijakan makro dan kemiskinan, misalnya dampak subsidi BBM terhadap kemiskinan, dampak terhadap taraf hidup penduduk miskin, kita juga tetap menyangsikan kesimpulan yang menyatakan bahwa kenaikan harga beras menjadi penyebab utama terjadinya pembengkakan jumlah penduduk miskin. bahkan menuduh bahwa bank dunia telah melakukan

simplici yang berlebihan atas kompleksitas masalah kemiskinan mengandalkan stundi stundi makro memang seringkali tidak memuaskan. Informasi yang di hasilkan hampir tidak pernah akurat yang valid Dan seterusnya.

Akibatnya, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran, ketidakjelasan target, biasa ke orang non miskin, menjadi. Keunggulan stundi ini adalah ke akurasiannya dalam mengidentifikasi karakteristik penduduk miskin sehingga pada gilirannya sangat memudahkan dalam implementasi program dan kegiatan pegentasan kemiskinan serta melakukan evaluasi atas kemajuan yang dicapai dalam berbagai upaya pegentasan kemiskinan. Dengan studi makro, para pengambil kebijakan tidak perlu lagi gagap setiap kali di Tanya, dimana persisnya terjadi penurunan angka kemiskinan, apa yang menyebabkan penurunan tersebut, upaya-upaya apa yang signifikan mengurangi angka kemiskinan, bagaimana efektifitas kebijakan dan program yang di implementasikan. Guna mengarahkan penelitian ini maka penelitian mempergunakan teori implementasi kebijakan Edward III yaitu komunikasi sumber daya disposisi struktur birokrasi komunikasi aspek yang cukup berperan dalam penerapan suatu kebijakan atau program penanggulangan Kemiskinan Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara adalah proses sosialisasi dari suatu program yang akan di terapkan, artinya suatu program penanggulangan kemiskinan, komunikasi sangat di perlukan terhadap target group sangat berperan sebagai upaya untuk memperkenalkan suatu program kebijakan penanggulangan

kemiskinan melalui sosialisasi terhadap masyarakat miskin sehingga program dapat berjalan secara baik dan tepat sasaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah Dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan adalah:

1. Kepentingan kelompok sasaran yaitu keseluruhan dari yang menyangkut upaya dalam pencapaian tujuan yang harus dilihat sebagai bentuk suatu proses. Dalam hal ini pun, semakin terjamin, dibutuhkan pentahapan, baik itu dalam segi pentahapan kebijakan implementasinya, terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran target yang termuat dalam kebijakan pemerintah daerah,
2. Dalam Program pelayanan kesehatan bagi Orang miskin perlu diperbaiki dengan cara mengajak partisipasi aktif dari masyarakat distrik nunggawi untuk mendukung program pelayanan ini yang telah berjalan meskipun masih mandek-mandek.
3. Tipe manfaat yaitu suatu ukuran terhadap tingkat kemampuan terhadap pemerintah distrik Distrik nunggawi Dalam pembangunan suatu sistem informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan bahkan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan, dengan adanya dana daerah untuk

pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi dana dalam pembangunan dari akibat kebijakan yang salah arah, dan sebaiknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih cepat dalam pengentasan kemiskinan yang ada.

4. Derajat perubahan yang diinginkan yaitu kemampuan dari Pemerintah distrik dan pemerintah desa harus meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan di berbagai departemen, lalu Pemberian bantuan modal dan pelatihan usaha kecil menengah (UKM).
5. Letak pengambilan keputusan apakah program pemerintah setempat sudah tepat atau belum. Implementasi kebijakan pemerintah daerah pendidikan bagi anak-anak yang ada di distrik nunggawi, membiayai biaya studi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Seperti di bebaskannya biaya sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) serta dibebaskan biaya-biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). lalu Program perbaikan rumah layak diuni. Karena saat ini warga masih pake rumah honai di distrik nunggawi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Diperlukan standar prosedur kerja yang jelas dan dokumen pembagian kerja kepada setiap perangkat, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi

dalam tahap implementasi sehingga pelaksanaan pembangunan di distrik nunggawi sesuai standar yang telah ditetapkan. agar pelaksanaan di distrik nunggawi dapat mencapai tujuan.

2. Diperlukan adanya peningkatan peran Pemerintah distrik nunggawi PDN dalam mengawasi jalannya pembangunan yang berdasarkan anggaran, oleh karena itu diperlukan penguatan peran PD dengan meningkatkan kualitas SDMnya melalui pelatihan yang semestinya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara hubungan antar organisasi belum dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya koordinasi dan kerja sama baik antara pemerintah pusat dengan daerah maupun seluruh instansi di daerah Kabupaten Tolikara Distrik Nunggawi agar pengentasan kemiskinan lebih efektif dan efisien.
3. Perlunya pembinaan, pelatihan-pelatihan dari pelaksana tingkat provinsi maupun kabupaten, bagi aparatur di tingkata distrik, agar nantinya dapat lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan, khususnya dapat mengerti dan tertip administrasi, berkaitan dengan kelengkapan administrasi, sehingga akuntabilitas pelaksana program lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Hessel Nogi S, Tangkilisan, M.Si. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset, 2003.
- Putra, Fadillah. (2003). *Paradigma kritis dalam studi kebijakan publik*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT Refika Aditama)
- Wahab, SA., 2001, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Ripley, Ronald Band Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Beraucracy*. Chicago: Dorsey Press
- MacMillan Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (1983), *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi: sage publications Conyer
- Abdulkahar. Dan badjuri, T, y, H, 2003. *Konsep Kebijakan Publik: Dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Uversity Press.
- Wahab, SA., 2001, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi

- Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Herabudin.2016. studi kebijakan dari filosofi ke implementasi. Bandung:pustaka setia
- Hanif N, *Teori Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, JAKARTA: Grasindo
- Azwar, 2001.M. Penelitian, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Bagir M, 1994. *Peleksanaan domokrasi pancasila dalam pembangunan jangkapanjang*. Yogyakarta: Makalah dalam lokakarnya pancasila Unpad.
- Belantika J. 2004. *Kemiskinan Keadilan Pemberdayaan Dan Penanggulangan* Jakarta.
- Effendy, O, U. 2004. *Ilmu.Teori. Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti.
- Ghalia T. 2001. *Perekoomian, Teori Dan Temuan Empiris*. Indonesia. Hamudy.J.M. 2008.*Pengentasan Rakyat Miskin Dan Pembangunan Manusia*. Bandung: Progran Pascasarjana fisip Unpan.